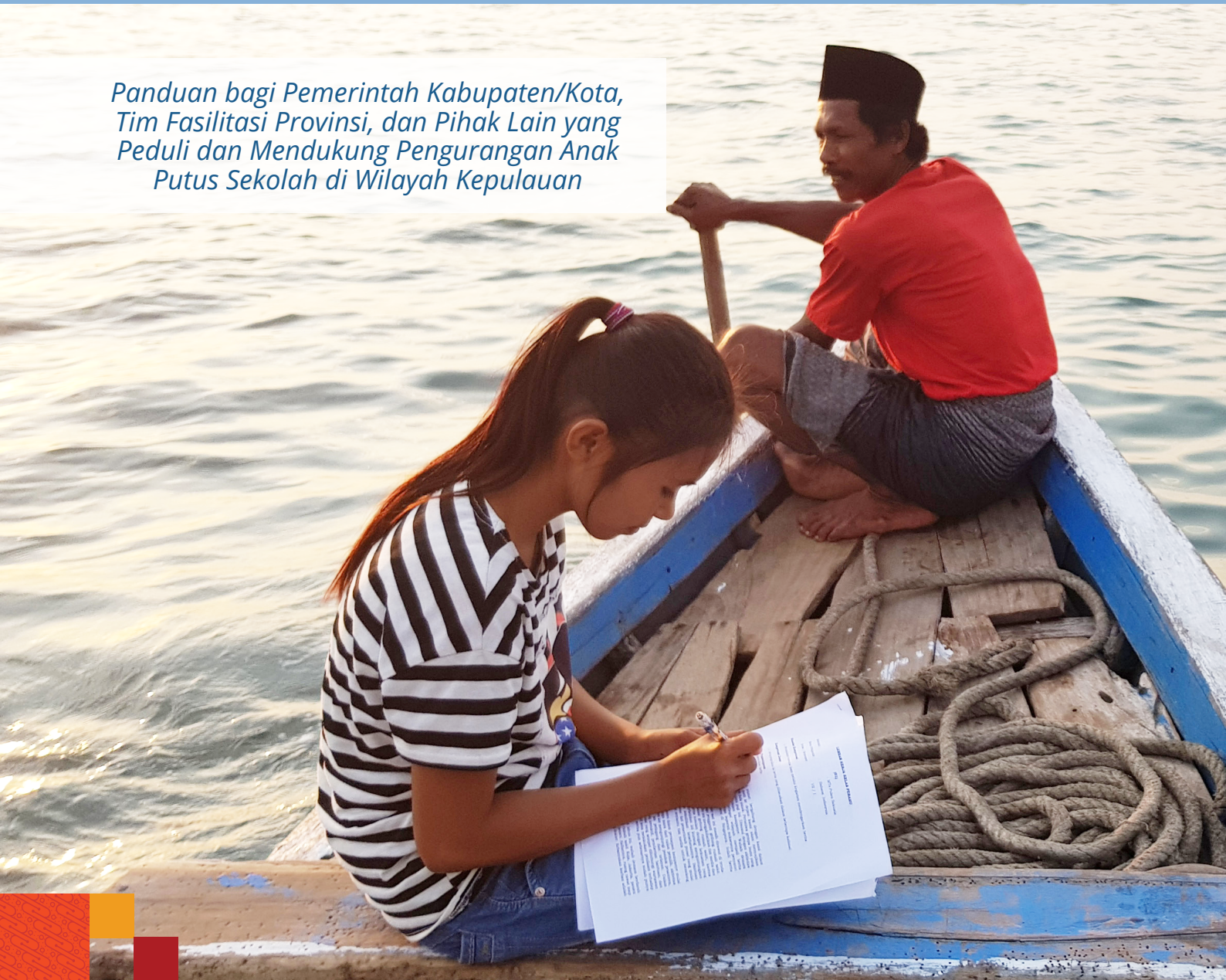




PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

Mencegah anak putus sekolah karena harus ikut melaut

*Panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota,
Tim Fasilitasi Provinsi, dan Pihak Lain yang
Peduli dan Mendukung Pengurangan Anak
Putus Sekolah di Wilayah Kepulauan*



Penulis:
Taufik Rinaldi
Indira Sari
Nurman Siagian

Kontributor:
Sitti Rohani

Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan
LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

November 2021

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000
E: communication@kompak.or.id
www.kompak.or.id



PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

Mencegah anak putus sekolah karena harus ikut melaut



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Bagian 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tantangan	2
1.3 Inovasi Kelas Perahu	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Capaian	4
Bagian 2 Komponen Pendukung Replikasi	5
2.1 Komitmen Kepala Daerah	5
2.2 <i>Ownership</i> /Rasa Memiliki Program dari Dinas Pendidikan.....	7
2.3 Peran Aktif Pemerintah Kecamatan dan Desa.....	7
2.4 Kerja Sama Lintas Sektor untuk Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif bagi Siswa....	8
2.5 Kecukupan Jumlah Guru Pendamping yang Kompeten	9
2.6 Kepastian Alokasi APBD untuk Menjangkau Seluruh Siswa yang Membutuhkan	10
Bagian 3 Tujuh Tahapan Penerapan Layanan Pendidikan Kelas Perahu	19
3.1 Konsolidasi Dukungan Lintas Aktor	20
3.2 Penyeepakatan Indikator Kinerja Bersama Lintas Sektor atas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu	20
3.3 Internalisasi Kegiatan ke dalam RKA Masing-Masing	21
3.4 Penyusunan/Update Regulasi sebagai Landasan Keberlanjutan Penyelenggaraan Layanan..	21
3.5 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Layanan Pendidikan Kelas Perahu	22
3.6 Sosialisasi Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu	24
3.7 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu	24
3.8 Pemantauan dan Evaluasi	24
Bagian 4 Pelembagaan dan Replikasi Kelas Perahu	26
Bagian 5 Lampiran	27
Contoh LKS Siswa KP	28

Daftar Gambar

Gambar 1. Ragam Alasan ATS Menurut Provinsi	1
Gambar 2. Alur Pelaksanaan dan Pendampingan Siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu	3
Gambar 3. Tahapan Replikasi dan Pelembagaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu	19
Gambar 4. Contoh Hasil Penyusunan LKS	23

Daftar Tabel

Tabel 1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan untuk Layanan Pendidikan Kelas Perahu	11
Tabel 2. Contoh Komponen Pembiayaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu	13
Tabel 3. Indikator Capaian Layanan Pendidikan Kelas Perahu	25

Daftar Kotak

Kotak 1: Materi Pokok Peraturan Bupati yang Merupakan Landasan Hukum Layanan Pendidikan Kelas Perahu:	6
--	---

Kata Pengantar

Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama periode 2015-2021, bersama Pemerintah Indonesia di pusat maupun di daerah, KOMPAK mengembangkan gagasan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, lalu mengujicobakannya sebagai model-model yang kemudian menjadi pendekatan atau cara kerja baru kepada pemerintah daerah di berbagai lokasi ujicoba. Seiring dengan berakhirnya dukungan Program KOMPAK pada tahun 2022, model-model ataupun pendekatan pembangunan yang terbukti bermanfaat telah diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah dan menjadi praktik rutin pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK.

Untuk memfasilitasi keinginan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam mereplikasi berbagai model tersebut KOMPAK menyusun sejumlah panduan replikasi untuk memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi agar mampu mereplikasi kegiatan di wilayahnya. Panduan replikasi ini memberikan gambaran komponen utama yang harus ada serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau pihak lain untuk bisa mewujudkan dan memastikan replikasi berjalan. Secara umum, panduan ini terdiri dari: 1) latar belakang mengapa inisiatif tersebut ada, tantangan, solusi inovatif, tujuan yang ingin dicapai 2) komponen-komponen pendukung replikasi, 3) tahapan penyiapan replikasi, dan 4) pelembagaan dan replikasi.

Layanan Pendidikan Kelas Perahu merupakan alternatif pembelajaran tambahan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah putus sekolah dikarenakan tuntutan ekonomi yang mengharuskan anak usia sekolah melaut. Pendekatan ini memungkinkan siswa tetap belajar di luar waktu dan ruang kelas. Sistem Belajar Mandiri dilakukan dengan menggunakan Lembar Kegiatan Siswa bagi siswa yang ikut melaut. KOMPAK mendukung penerapan inisiatif ini yang telah dilakukan sejak tahun 2016 di Kabupaten Pangkep melalui penguatan tata kelola diantaranya penguatan regulasi dan penganggaran (termasuk pengadaan insentif bagi guru-guru yang melaksanakan pendampingan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pangkep), serta pelibatan dan peran aktif kecamatan dan desa. Dalam panduan ini, peran penting Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan layanan dan tata kelola pelaksanaan menjadi hal penting yang dapat dipelajari untuk mengatasi persoalan putus sekolah khususnya dikarenakan ikut bekerja.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian/Lembaga. Ke depan, kami berharap adanya panduan ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah selaku pemberi layanan melainkan juga masyarakat sebagai penerima layanan.

Anna Winoto

Team Leader

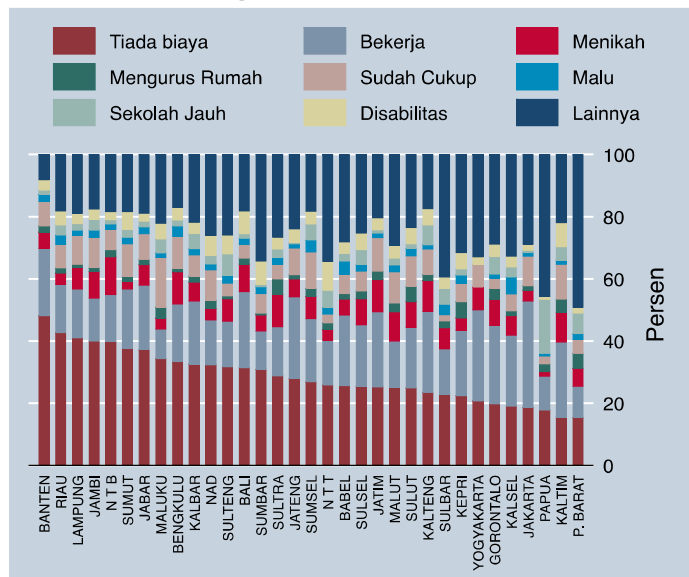
Bagian 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi persoalan krusial sektor pendidikan di Indonesia. ASUSENAS (2017) menunjukkan fakta bahwa anak bekerja merupakan salah satu penyebab ATS. Indonesia mendefinisikan ATS sebagai anak berusia 7–18 tahun dengan kondisi: **tidak pernah** sekolah, **putus sekolah** pada jenjang tertentu, atau menyelesaikan jenjang tertentu tetapi **tidak melanjutkan pendidikan**.

Gambar 1. Ragam Alasan ATS Menurut Provinsi



Sumber: KOMPAK, hasil olah data SUSENAS 2017

Dalam hal anak putus sekolah, SUSENAS (2017) menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, baik karena ketiadaan biaya (28,5 persen) maupun anak yang bekerja (20,6 persen). Kuatnya pengaruh kondisi ekonomi terhadap kejadian anak putus sekolah tercermin dari lebih rendahnya tingkat keberlanjutan (*survival rate*) bersekolah pada anak dari keluarga miskin dan di perdesaan (KOMPAK, hasil olah data SUSENAS 2019).

Isu anak bekerja cukup menonjol di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan/Pangkep, Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah kepulauan terdiri dari 117 pulau dengan luasan wilayah didominasi pulau-pulau kecil dan laut, mayoritas pekerjaan orangtua adalah nelayan dan membawa serta anak mereka melaut. Oleh karenanya, anak usia sekolah rentan putus sekolah karena harus melaut dan membantu orang tua termasuk di jam sekolah. Anak biasanya melaut dalam rentang waktu satu hari hingga tiga bulan. Jika sekolah tetap menerapkan aturan kaku dengan mengeluarkan anak yang membolos dan tidak bersekolah karena melaut, jumlah anak dengan status ATS akan meningkat (KOMPAK, 2020).

Untuk mengatasi situasi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sejak tahun 2017 mencoba menerapkan prinsip *Flexible Learning Strategies* atau FLS (UNESCO, 2017). Dengan prinsip FLS, siswa tidak lagi terikat pada lokasi dan waktu belajar sekolah normal. Mereka diperbolehkan belajar dengan waktu dan tempat yang fleksibel, termasuk di atas perahu saat melaut. Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep menerapkan prinsip FLS bagi siswa yang melaut yang masih terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

“Kelas Perahu adalah penerapan konsep Merdeka Belajar yang sesuai dengan kebutuhan kami di daerah pesisir dan kepulauan. Untuk mengembangkan metode belajar mandiri ini, Dinas Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri dan harus didukung oleh semua sektor, terutama aparat desa dan sektor swasta.”

Dr. Sabrun Jamil S.Pi., M.P. (Kepala Dinas Pendidikan Pangkajene dan Kepulauan)

1.2 Tantangan

Salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan adalah mencegah kejadian atau mengurangi jumlah anak putus sekolah karena harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Di Kabupaten Pangkep, umumnya siswa melaut karena tuntutan ekonomi. Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pangkep rasio jumlah anak putus sekolah karena melaut terhadap jumlah anak putus sekolah mencapai 50% pada tahun 2019. Dengan kata lain, faktor anak melaut berkontribusi 50% terhadap angka putus sekolah. Bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan juga ikut melaut jika dalam keluarga tidak ada anak laki-laki atau anak lain memiliki kondisi fisik yang tidak memungkinkan ikut melaut

Dalam menjalankan upaya menekan jumlah anak melaut yang putus sekolah hingga nol (0), Dinas Pendidikan menghadapi sejumlah tantangan yaitu:

- a) Metode kegiatan belajar mengajar yang masih terbatas yakni secara tatap muka di kelas tidak memungkinkan siswa melaut dapat mengikutinya tiap hari dan dengan tepat waktu.
- b) Anggaran dan jumlah sekaligus kapasitas guru yang dapat mendukung metode belajar mandiri bagi siswa melaut terbatas. Kapasitas guru ini mencakup antara lain kemampuan menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan metode penilaian.
- c) Anggaran untuk mendata anak/siswa melaut terbatas, mengakibatkan perolehan jumlah riil siswa yang rentan putus sekolah karena melaut sulit dilakukan.
- d) Motivasi orang tua untuk memprioritaskan waktu belajar anak/siswa rendah karena alasan kebutuhan ekonomi keluarga.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkep menjalankan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir. Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep merancang Layanan Pendidikan Kelas Perahu sebagai media yang memastikan siswa tetap aktif bersekolah.

Layanan Pendidikan Kelas Perahu sebagai bagian dari kegiatan pendidikan formal sudah dimulai sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2019, layanan ini diperkuat implementasinya melalui Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir. KOMPAK memfasilitasi penyusunan peraturan bupati ini dalam rangka memperkuat landasan penyelenggaraan layanan dan pelibatan lintas sektor, kecamatan, dan desa.

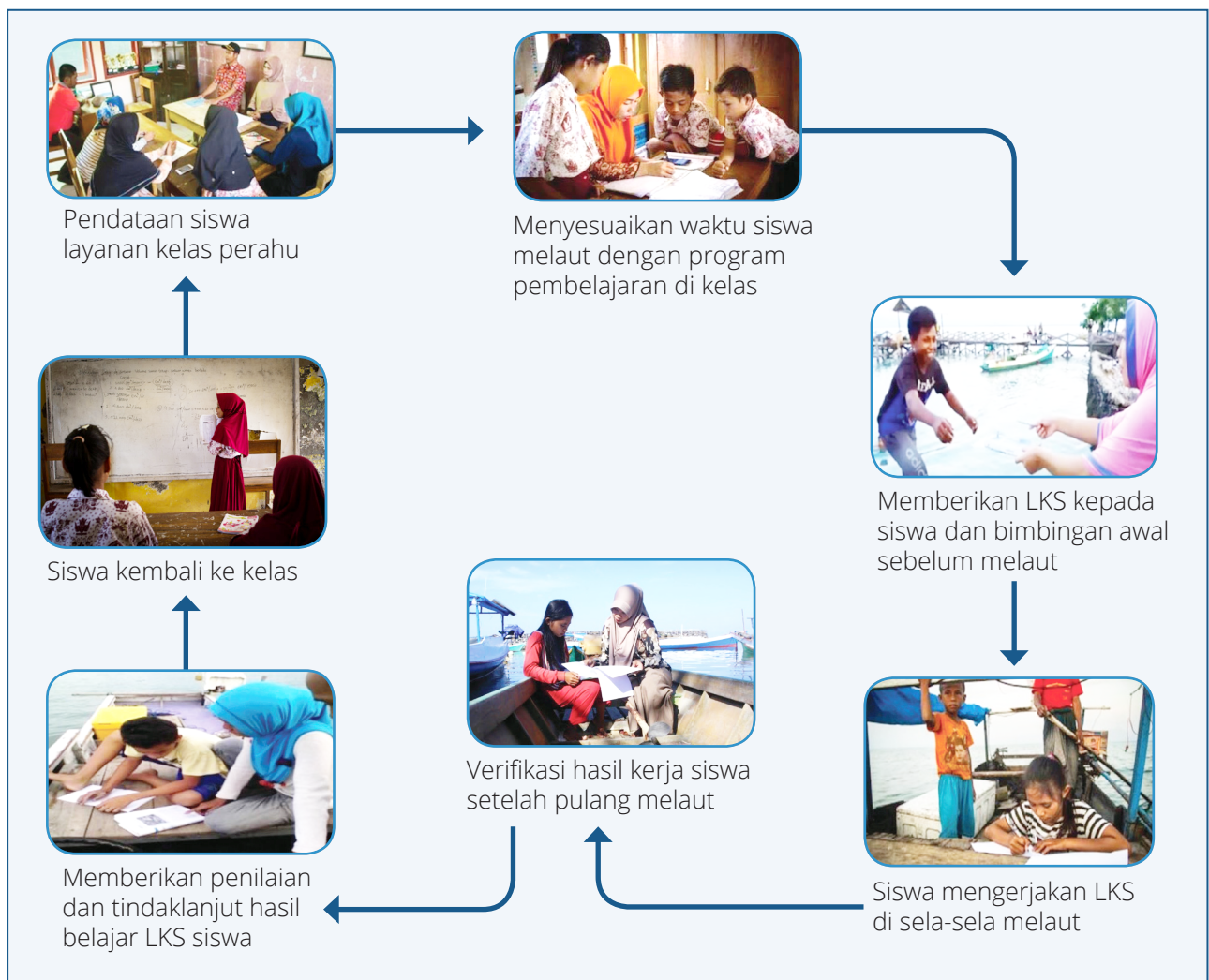
1.3 Inovasi Kelas Perahu

Layanan Pendidikan Kelas Perahu adalah layanan bagi siswa yang melaut yang menerapkan pendekatan belajar mandiri di perahu menggunakan LKS. Model ini merupakan layanan khusus bagi anak melaut agar tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas di luar dan di dalam kelas.

Inovasi yang dihasilkan model ini adalah sistem pembelajaran yang **akomodatif** dan **fleksibel** dalam konteks pendidikan formal yang disebut Kelas Perahu. Ketersediaan sistem pembelajaran yang fleksibel **memungkinkan siswa tetap belajar** di luar jam sekolah dan ruang kelas, termasuk di atas perahu saat melaut bersama orang tua.

Dalam sistem pembelajaran ini, anak yang pergi melaut dibekali LKS. Ketika kembali dari melaut, anak dapat menyerahkan LKS tersebut kepada guru pendamping Kelas Perahu yang berada di desa yang sama tempat anak tersebut tinggal. Guru pendamping akan memeriksa LKS kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar secara singkat dengan metode diskusi. Setelah selesai melaut, siswa dapat kembali bersekolah untuk mengikuti pembelajaran secara konvensional. Hal ini dimungkinkan karena secara administrasi siswa tersebut tetap terdaftar dalam DAPODIK.

Gambar 2. Alur Pelaksanaan dan Pendampingan Siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu



1.4 Tujuan

Tujuan pokok Layanan Pendidikan Kelas Perahu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yakni agar pendidikan dapat dinikmati oleh semua warga negara terlepas dari kondisi sosial dan ekonominya. Secara khusus, tujuan Layanan Pendidikan Kelas Perahu adalah sebagai berikut:

- ☑ mencegah anak usia belajar yang tinggal di wilayah kepulauan dan bekerja atau melaut putus sekolah,
- ☑ meningkatkan partisipasi siswa melaut dalam kegiatan belajar mengajar sesuai jenjang pendidikannya, dan
- ☑ meningkatkan kemampuan sekolah/tenaga pengajar dalam menyusun LKS dan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan konteks sosial masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah kepulauan.

1.5 Capaian

Untuk Kabupaten Pangkep yang telah mulai mereplikasi pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu ke kecamatan lainnya sejak 2019, capaian penyelenggaraan layanan tersebut menjadi landasan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu telah menghasilkan sejumlah capaian, yaitu:

- a) Angka putus sekolah bagi siswa pelaut di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, wilayah awal percontohan, menurun dari 2,25 persen tahun 2016-2017 menjadi kurang dari 1 persen pada tahun 2020.
- b) Keberhasilan dalam mempertahankan anak yang rentan putus sekolah dalam sistem pendidikan formal. Data Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2016/17 dan 2017/18 menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil mencegah 7,7 persen dan 7,8 persen siswa melaut dari putus sekolah. Pada tahun ke-3, Layanan Pendidikan Kelas Perahu berhasil mendorong perubahan perilaku orang tua dan siswa sehingga pada tahun ajaran berikutnya jumlah siswa SD dan SMP yang melaut di jam sekolah berkurang menjadi 1,8-1,9 persen.
- c) Penyelenggaraan tata kelola layanan pendidikan yang lebih responsif terhadap situasi sosial ekonomi siswa dari kelompok keluarga nelayan. Penyampaian Layanan Pendidikan Kelas Perahu berhasil mendorong terwujudnya penyesuaian kompetensi guru dan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar agar lebih sesuai bagi siswa yang butuh cara belajar yang berbeda dan mendorong terciptanya lingkungan belajar di sekolah yang melindungi siswa melaut dari perundungan.
- d) Penguatan komitmen keberlanjutan dalam perluasan penyelenggaraan layanan. Untuk mendukung ini, Pemerintah Kabupaten menyiapkan Peta Jalan Pelaksanaan Replikasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu.
- e) Ketersediaan panduan pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu bagi seluruh sekolah.

Bagian 2

Komponen Pendukung Replikasi

Kabupaten/kota yang akan menerapkan sistem pembelajaran akomodatif dan fleksibel dengan model Kelas Perahu dari Kabupaten Pangkep ini memerlukan enam komponen berikut:

1 komitmen kepala daerah untuk menyediakan landasan kebijakan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu,

2 *ownership*/rasa memiliki program dari Dinas Pendidikan dan keyakinan bahwa layanan ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan Urusan Pendidikan, alih-alih hanya mandat dari kebijakan setempat,

3 peran aktif kecamatan dan desa untuk memantau sekolah di pulau dan mengawasi orang tua dan pemberi kerja dalam mendukung siswa melaut mengikuti Kelas Perahu,

4 kerja sama di antara perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa,

5 kecukupan jumlah guru pendamping yang kompeten, dan

6 kepastian alokasi APBD untuk menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan.

2.1 Komitmen Kepala Daerah

Komitmen Kepala Daerah diperlukan mengingat penerapan model ini mencakup kepemimpinan Kepala Daerah dalam membangun kolaborasi lintas sektor, menyusun kebijakan pendanaan yang memungkinkan tersedianya anggaran yang stabil, memadai, dan berjangka panjang, memberikan dukungan penyediaan guru pendamping terlatih, dan menyelenggarakan pengawasan hasil pelaksanaan berdasarkan komitmen daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi semua anak di wilayahnya.

Mengingat layanan ini merupakan layanan darurat untuk memastikan siswa melaut tetap belajar meski di luar jam sekolah dan ruang kelas, dalam jangka menengah Kepala Daerah perlu memastikan agar:

- ☑ sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memiliki guru dengan komposisi dan kompetensi yang memadai, selain dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar,
- ☑ kegiatan lintas sektor menggunakan data siswa melaut untuk penajaman kriteria keluarga sasaran prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan daerah, dan
- ☑ sinergi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berorientasi pada pengurangan jumlah pekerja di bawah umur dan pencegahan/penanganan perundungan terhadap anak melaut.

Penegasan bahwa Layanan Pendidikan Kelas Perahu merupakan kebijakan daerah yang harus diterapkan untuk mencegah siswa melaut putus sekolah harus didukung dengan kolaborasi lintas sektor. Lebih jauh, pendanaan penyelenggaraan layanan yang pasti perlu dituangkan dalam suatu kebijakan daerah. Di Kabupaten Pangkep, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir menjadi landasan hukum Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Peraturan bupati tersebut selanjutnya menjadi acuan kerja sama lintas pelaku, acuan pengelolaan dukungan sumber daya, dan penjaminan kepastian anggaran.

Kotak 1: Materi Pokok Peraturan Bupati yang Merupakan Landasan Hukum Layanan Pendidikan Kelas Perahu:

- Azas, maksud, dan tujuan;
- Prinsip penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu;
- Tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- Tugas guru Layanan Pendidikan Kelas Perahu;
- Tugas kepala sekolah terkait Layanan Pendidikan Kelas Perahu;
- Syarat peserta didik mengikuti Layanan Pendidikan Kelas Perahu;
- Sistem pembelajaran Layanan Pendidikan Kelas Perahu;
- Dukungan orangtua peserta didik dan masyarakat;
- Pengawasan dan pelaporan; dan
- Pendanaan.

Sumber: Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir.

Lebih jauh, komitmen Kepala Daerah untuk mengawasi dan memberikan arahan dibutuhkan sekurang-kurangnya dalam hal-hal berikut:

- a) penyiapan peraturan bupati sebagai landasan/regulasi penyelenggaraan layanan,

- b) penganggaran operasional Layanan Pendidikan Kelas Perahu, termasuk tambahan insentif bagi guru pendamping yang melakukan kunjungan ke rumah/pendampingan siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu,
- c) peran yang diharapkan dari Kepala Desa dan Camat, dan
- d) koordinasi dan kerja sama dengan Bappeda, Dinas Pendidikan, dan OPD terkait dalam rangka mengefektifkan penjangkauan Layanan Pendidikan Kelas Perahu bagi seluruh siswa yang masih melaut.

2.2 Ownership/Rasa Memiliki Program dari Dinas Pendidikan

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam Urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan perlu memahami dan meningkatkan pemahaman seluruh satuan pendidikan di wilayahnya bahwa model Kelas Perahu bukan tambahan kegiatan alih-alih bagian integral dari kegiatan belajar mengajar sekolah. Karenanya, Dinas Pendidikan perlu merumuskan dan mengomunikasikan kebutuhan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu sesuai konteks masing-masing wilayah/kabupaten dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan.

Dinas Pendidikan perlu mengadakan dan mengembangkan sistem pendataan siswa melaut, program peningkatan kapasitas guru pendamping siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu, program peningkatan kualitas LKS, memastikan kecukupan operasional guru pendamping, serta mengelola rapat-rapat koordinasi baik yang lintas sektor maupun dengan kecamatan atau pemerintah desa dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Dengan demikian, dalam penerapan model ini Dinas Pendidikan berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu skala kabupaten. Pengelolaan layanan meliputi konsolidasi data siswa melaut yang merupakan sasaran layanan Kelas Perahu, penetapan target jumlah dan sebaran siswa Kelas Perahu yang akan dilayani, analisis kebutuhan pelaksanaan, internalisasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu dalam perencanaan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan, penganggaran pada RKA Dinas Pendidikan, pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu, serta pengelolaan pelatihan/peningkatan kapasitas guru pendamping dalam Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

2.3 Peran Aktif Pemerintah Kecamatan dan Desa

Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja Layanan Pendidikan Kelas Perahu adalah peran keluarga. Pengalaman penerapan Layanan Pendidikan Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep menunjukkan perlunya peran aktif Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam:

- a) memantau satuan pendidikan khususnya mendukung guru dalam memberikan pendampingan kepada siswa yang melaut,
- b) mengadvokasi orang tua agar mendukung siswa melaut tetap belajar melalui Layanan Pendidikan Kelas Perahu,

- c) mengelola bantuan pendanaan bagi keluarga siswa melaut agar siswa dapat mengoptimalkan manfaat Layanan Pendidikan Kelas Perahu sehingga tidak putus sekolah,
- d) memanfaatkan data keluarga siswa melaut dalam penajaman kriteria kelompok sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan/desa agar keluarga dapat mengurangi keterlibatan siswa dalam kegiatan melaut, dan
- e) memanfaatkan APBDesa untuk mendukung kegiatan pendampingan siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu di desa masing-masing, antara lain untuk sosialisasi tentang pendekatan Layanan Pendidikan Kelas Perahu kepada orangtua dan untuk bantuan alat pelindung LKS bagi tiap siswa melaut.

Dalam hal dukungan lewat APBDesa, Pemerintah Kecamatan dapat memfasilitasi Pemerintah Desa agar mampu mengalokasikan APBDesa untuk beberapa belanja berikut:

- ☑ Belanja untuk sosialisasi ke masyarakat dan orang tua murid (penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat), terdiri atas: belanja alat tulis kantor dan benda pos, pencetakan/penggandaan, barang konsumsi (makanan dan minuman), honorarium tenaga ahli/narasumber, dan honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.
- ☑ Belanja untuk Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar, terdiri atas: belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa (bagi guru pendamping yang juga melakukan tugas sebagai pendamping dan pembina sanggar seni dan belajar).
- ☑ Belanja untuk beasiswa murid (masuk pada klasifikasi beasiswa murid berprestasi/masyarakat miskin).
- ☑ Belanja untuk penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa termasuk pendataan/penyediaan data anak usia sekolah yang melaut), terdiri atas: belanja alat tulis kantor dan benda pos, pencetakan/penggandaan, barang konsumsi (makanan dan minuman), honorarium petugas, dan honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.

2.4 Kerja Sama Lintas Sektor untuk Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif bagi Siswa

Di luar Dinas Pendidikan, penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan berikut:

- ☑ Bappeda; berperan dalam memastikan anggaran operasional Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Bappeda memastikan Layanan Pendidikan Kelas Perahu didukung sumber daya yang memadai sesuai analisis kebutuhan dari Dinas Pendidikan, memastikan keberlanjutan Layanan Pendidikan Kelas Perahu guna menjangkau siswa yang masih melaut, dan mendorong internalisasi kegiatan Layanan Pendidikan Kelas Perahu dalam RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
- ☑ DPMD; berperan dalam membina Pemerintah Desa agar mendukung Layanan Pendidikan Kelas Perahu melalui pemantauan dan advokasi bagi keluarga sasaran di desanya masing-masing guna memastikan siswa yang terpaksa melaut dapat mengikuti Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

- ☑ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga untuk memprioritaskan pendidikan anak dengan cara memberi dukungan agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara komprehensif di sekolah, dan jika anak terpaksa melaut, memberi dukungan agar anak bisa mengikuti Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Di samping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berperan dalam mendukung sekolah untuk mengembangkan lingkungan yang mencegah terjadinya perundungan.
- ☑ Dinas Sosial; berperan dalam memastikan keluarga yang anaknya terpaksa melaut sudah termasuk dalam keluarga sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan daerah.
- ☑ Kepala Sekolah; berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu bagi siswa melaut yang terdaftar di sekolahnya. Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk menunjuk guru pendamping siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu, membimbing dan mengawasi pengembangan bahan ajar dan LKS Layanan Pendidikan Kelas Perahu, dan mengoordinasikan kebutuhan operasional terkait Layanan Pendidikan Kelas Perahu di sekolahnya dengan Dinas Pendidikan.
- ☑ Keluarga siswa melaut; berperan dalam mendukung siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sekaligus menyelesaikan LKS sesuai arahan/ bimbingan guru, dan secara bertahap mendukung siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara komprehensif di sekolah.
- ☑ Pemerintah Kecamatan dan Desa; berperan dalam meningkatkan dan mengawasi dukungan keluarga siswa melaut selama kegiatan Layanan Pendidikan Kelas Perahu.
- ☑ Pemangku kepentingan lainnya seperti CSR, tokoh masyarakat, dan tokoh agama berperan dalam:
 - a. CSR dapat menyediakan dukungan anggaran untuk operasional siswa ataupun operasional sekolah menyelenggarakan layanan Kelas Perahu.
 - b. Tokoh agama/tokoh masyarakat, khususnya melalui Dewan Pendidikan, dapat memantau dukungan kepala desa dan mendukung sosialisasi Kelas Perahu agar orangtua mendorong anaknya tetap sekolah.

2.5 Kecukupan Jumlah Guru Pendamping yang Kompeten

Sumber daya utama Layanan Pendidikan Kelas Perahu adalah guru pendamping. Tingkat kesiapan guru pendamping menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Guru pendamping diharapkan telah mempersiapkan bahan ajar dan LKS pada awal tahun ajaran sesuai dengan kebutuhan dan siap kapan saja dibutuhkan oleh siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Jika hal tersebut sulit dilakukan di tahap awal penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu, paling tidak guru pendamping perlu mempersiapkan bahan ajar dan LKS yang tiap bulan sesuai dengan kebutuhan siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan (sekolah) perlu mempertimbangkan jumlah dan sebaran siswa melaut dalam menentukan jumlah guru pendamping di tiap sekolah. Informasi ini selanjutnya menjadi basis jumlah guru pendamping yang perlu mendapat pelatihan atau *refreshment training* yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan dan sekolah diharapkan agar terus melakukan koordinasi dalam meningkatkan jumlah guru pendamping yang kompeten. Koordinasi ini penting untuk mewujudkan rasio guru pendamping terhadap siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu yang mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar.

2.6 Kepastian Alokasi APBD untuk Menjangkau Seluruh Siswa yang Membutuhkan

Bappeda berperan dalam memastikan tersedianya anggaran Kelas Perahu yang memadai untuk melayani seluruh siswa melaut yang termasuk dalam target layanan di tiap tahun berjalan.

Alokasi APBD diperlukan untuk:

- a) insentif guru pendamping siswa melaut,
- b) kegiatan peningkatan kapasitas guru pendamping siswa melaut,
- c) kegiatan peningkatan kualitas LKS,
- d) alat/kelengkapan pelindung LKS untuk mencegah LKS rusak selama digunakan di laut, dan
- e) sosialisasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu.



Contoh LKS selengkapnya ada di Lampiran.

Peningkatan kapasitas guru pendamping dan sosialisasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu dapat dibiayai lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan kualitas LKS dapat dibiayai lewat Dana Insentif Daerah (DID). Insentif guru pendamping dapat dibiayai lewat APBD secara umum. Untuk membantu memastikan keberlanjutan Layanan Pendidikan Kelas Perahu hingga seluruh siswa melaut dapat dilayani, Bappeda dan Dinas Pendidikan perlu merancang alokasi anggaran Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk tahun rencana (n) dan tahun berikutnya (n+1).

Pembiayaan

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dukungan APBD untuk Layanan Pendidikan Kelas Perahu dapat dialokasikan pada subkegiatan berikut:

Tabel 1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan untuk Layanan Pendidikan Kelas Perahu

No.	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Subkegiatan
1.	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.23
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.36
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.01.02.2.02.36 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Berikut ini adalah jenis belanja dan pembiayaan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu sebagai jenis pembiayaan minimum yang diharapkan tersedia. Sebagian di antaranya memerlukan pengadaan dengan dukungan dari lintas sektor.

Belanja Operasional Dinas Pendidikan, meliputi:

- 1) Belanja untuk penyusunan peraturan, kebijakan, dan SOP (penyusunan regulasi tingkat kabupaten seperti peraturan bupati untuk mendukung pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu) yang terdiri atas: belanja kertas, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, dan honorarium panitia.
- 2) Belanja untuk desain kurikulum Kelas Perahu, terdiri atas: belanja kertas, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, dan honorarium panitia.
- 3) Belanja untuk pembinaan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam mendukung pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu, terdiri atas: belanja alat tulis kantor, pencetakan, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, honorarium panitia, dan uang saku peserta sosialisasi.
- 4) Belanja untuk sosialisasi model Layanan Pendidikan Kelas Perahu kepada Pemerintah Desa, dan sekolah lain di wilayah kabupaten, terdiri atas: belanja alat tulis kantor, pencetakan, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, honorarium panitia, dan uang saku peserta sosialisasi.

- 5) Belanja untuk penyusunan RPP dan LKS, terdiri atas: belanja kertas, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, dan honorarium panitia.
- 6) Belanja untuk pelatihan guru/fasilitator, terdiri atas: belanja alat tulis kantor, pencetakan, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, honorarium panitia, dan uang saku peserta sosialisasi.
- 7) Belanja untuk pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu, yang ditanggung APBD pada DPA Dinas Pendidikan, yaitu belanja jasa pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dapat menjadi sumber pendanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Adapun yang termasuk dalam belanja dengan BOS adalah: belanja ATK, kertas, pencetakan, dan belanja makanan dan minuman untuk fasilitasi Urusan Pendidikan.

Dinas Pendidikan dengan dukungan satuan pendidikan perlu melakukan pendataan guru pendamping. Pendataan ini menjadi salah satu basis penentuan alokasi insentif guru pendamping. Alokasi insentif tersebut diharapkan mempertimbangkan kinerja guru pendamping (misalnya, jumlah siswa yang didampingi dalam satu minggu).

Tabel 2. Contoh Komponen Pembiayaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya Dinas Pendidikan	Sumber Pembiayaan	
									Sekolah	APBDesa
	APBD									
	01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan								
	01.01.02.2.01/ 01.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
	01.01.02.2.01.28/ 01.01.02.2.02.41	Sub-Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
1		Penyusunan Peraturan, Kebijakan dan SOP (Pembuatan regulasi tingkat kabupaten seperti peraturan bupati dan sejenisnya untuk mendukung pelaksanaan kelas perahu)								
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	paket	2 kali	227.000	454.000		454.000	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	orang	7 kali	39.410	2.758.700		2.758.700	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5	orang	7 kali	400.000	14.000.000		14.000.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Tim	1 kali	2.350.000	2.350.000	19.562.700	2.350.000	
2		Pembinaan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam mendukung pelaksanaan kelas perahu								
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50	paket	1 kali	27.000	1.350.000		1.350.000	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	50	paket	1 kali	15.000	750.000		750.000	

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya Dinas Pendidikan	Sumber Pembiayaan	
									Sekolah	APBDesa
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55	orang	1 kali	39.410	2.167.550		2.167.550	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2	orang	1 kali	400.000	800.000		800.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan								
		- Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	1 Kali	2.350.000	2.350.000		2.350.000	
		- Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	50	Orang	1 kali	100.000	5.000.000	12.417.550	5.000.000	
3	Sosialisasi model layanan pendidikan kelas perahu kepada Pemerintah Desa, dan sekolah lain di wilayah kabupaten									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60	paket	1 kali	25.000	1.500.000		1.500.000	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	60	paket	1 kali	10.000	600.000		600.000	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65	orang	1 kali	25.000	1.625.000		1.625.000	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2	orang	1 kali	500.000	1.000.000		1.000.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan								
		- Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	1 Kali	2.350.000	2.350.000		2.350.000	

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya Dinas Pendidikan	Sumber Pembiayaan	
									Sekolah	APBDesa
		- Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	60	Orang	1 kali	100.000	6.000.000	13.075.000	6.000.000	
4		Pelatihan Guru/Fasilitator								
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40	paket	1 kali	27.000	1.080.000		1.080.000	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40	paket	1 kali	15.000	600.000		600.000	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45	orang	1 kali	39.410	1.773.450		1.773.450	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2	orang	1 kali	400.000	800.000		800.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan								
		- Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	1 kali	2.350.000	2.350.000		2.350.000	
		- Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	40	Orang	1 kali	100.000	4.000.000	10.603.450	4.000.000	
5		Pendataan (Penyediaan Data) Anak Usia Sekolah melaut								
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	40	paket	1 kali	103.000	4.120.000		4.120.000	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40	paket	10 kali	39.410	15.764.000		15.764.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan								
		- Honorarium Tim Pelaksana (40 Sekolah)	40	paket	1 kali	600.000	24.000.000	43.884.000	24.000.000	

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya Dinas Pendidikan	Sumber Pembiayaan	
									Sekolah	APBDesa
	1.01.02.2.01.23/ 1.01.02.2.02.36	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik								
6		Pelaksanaan Kelas Perahu								
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	447	paket	2 kali	79.560	71.126.640			71.126.640
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	447	paket	2 kali	105.000	93.870.000			93.870.000
	5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	28	orang	4 kali	11.260	1.261.120			1.261.120
	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	28	orang	12 bulan	1.100.000	369.600.000	535.857.760	369.600.000	
	1.01.03.	Program Pengembangan Kurikulum								
	1.01.03.2.01	Kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
	1.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan: Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
7		Desain Kurikulum Kelas Perahu								
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	paket	2 kali	227.000	454.000		454.000	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	orang	6 kali	39.410	2.364.600		2.364.600	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5	orang	6 kali	400.000	12.000.000		12.000.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Tim	1 kali	2.350.000	2.350.000	17.168.600	2.350.000	
8		Penyusunan RPP dan LKS								
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	paket	2 kali	227.000	454.000		454.000	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	orang	6 kali	39.410	2.364.600		2.364.600	

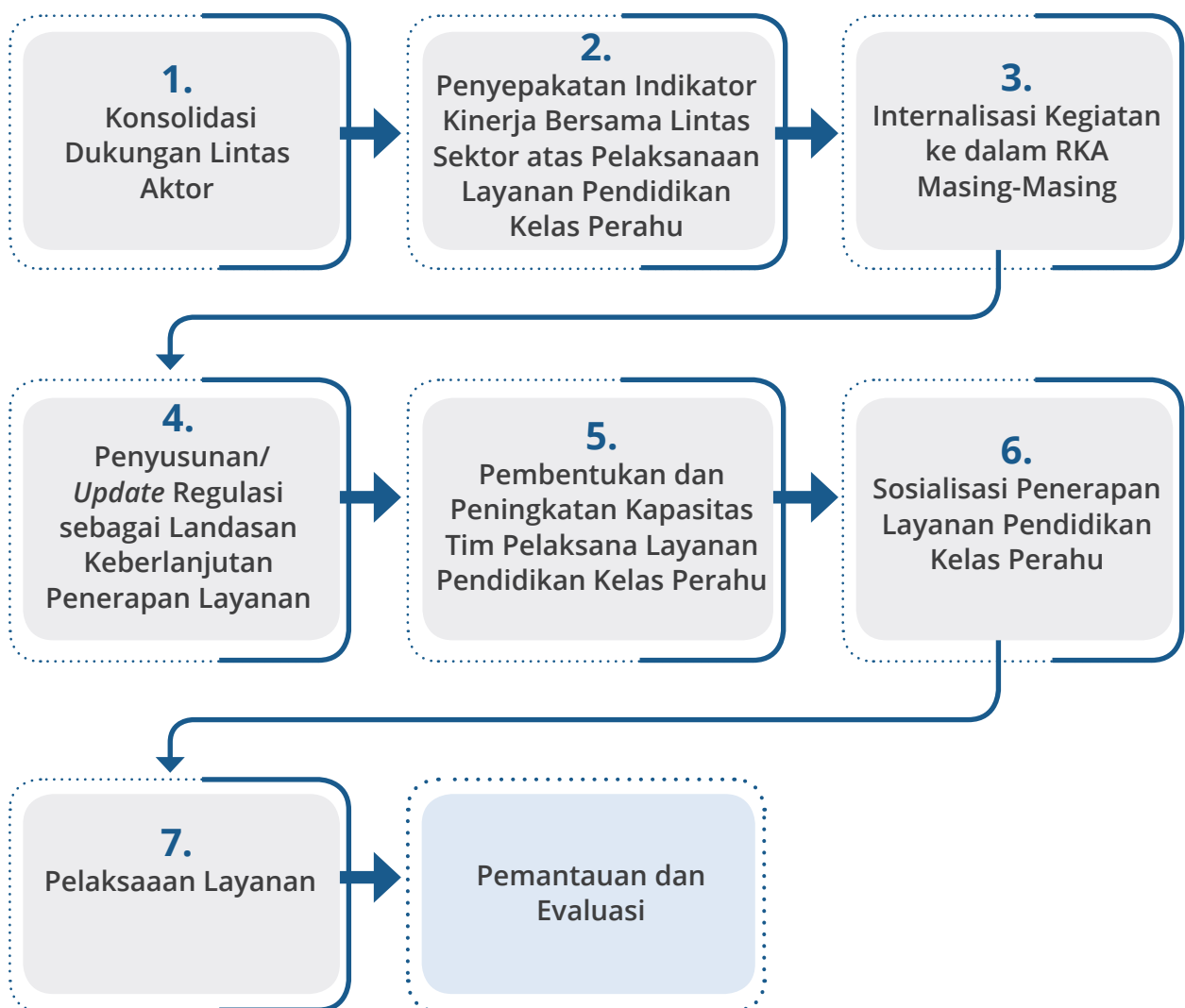
No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya Dinas Pendidikan	Sumber Pembiayaan	
									Sekolah	APBDesa
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5	orang	6 kali	400.000	12.000.000		12.000.000	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Tim	1 kali	2.350.000	2.350.000	17.168.600	2.350.000	
APBDESA										
Permendagri 20/2018										
9	2.1.03	Sosialisasi ke Masyarakat dan Orang Tua Murid (Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat)								
	5.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	28	Desa	1 kali	227.000	6.356.000			
	5.2.1.05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	28	Desa	1 kali	200.000	5.600.000			
	5.2.1.06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	28	Desa	20 Orang	39.410	22.069.600			
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	28	Desa	4 Orang	100.000	11.200.000			
	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1	Orang	28 Desa	400.000	11.200.000	56.425.600		
10	2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar								
	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	28	Orang	12 Bulan	500.000	168.000.000	168.000.000		
11	2.1.10	Beasiswa Murid								
	5.2.2.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	44	Orang	12 Bulan	100.000	52.800.000	52.800.000		
TOTAL								946.963.260	503.479.900	166.257.760

Bagian 3

Tujuh Tahapan Penerapan Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Penerapan Layanan Pendidikan Kelas Perahu oleh Pemerintah Kabupaten meliputi tujuh tahapan berikut.

Gambar 3. Tahapan Replikasi dan Pelembagaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu



3.1 Konsolidasi Dukungan Lintas Aktor

Tahap ini bertujuan menegaskan komitmen lintas aktor terhadap keberhasilan penerapan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk mencegah siswa melaut putus sekolah, khususnya komitmen dari para pelaksana kebijakan yaitu perangkat daerah dan Pemerintah Desa. Dalam tahap ini, Bupati mengonfirmasi komitmennya untuk menyelenggarakan Layanan Pendidikan Kelas Perahu kepada Dinas Pendidikan, Bappeda (sebagai koordinator perencanaan dan anggota TAPD), DPMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa. Bupati selanjutnya menyampaikan arahan terkait peran yang diharapkan dari masing-masing pihak. Peran para perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa ini selengkapnya ada di Subbab 2.2 s.d. 2.4.

Di tahap ini diharapkan para pelaku menunjukkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan layanan dan memahami peran masing-masing serta siap melaporkan kemajuan penyelenggaraan layanan kapan pun diminta oleh Bupati.

3.2 Penyepakatan Indikator Kinerja Bersama Lintas Sektor atas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Tahap ini bertujuan menerjemahkan komitmen lintas aktor demi memastikan keberhasilan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu ke dalam indikator kinerja program/kegiatan instansi masing-masing. Tiap instansi memetakan program/kegiatan/subkegiatan yang termasuk dalam tugas dan fungsinya yang sesuai dengan peran yang diharapkan (lihat kembali Subbab 2.2 s/d 2.4). Setelah memetakan program/kegiatan/subkegiatan yang relevan, tiap instansi merumuskan rancangan indikator kinerja yang menjadi kontribusinya dalam penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Bappeda dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi rapat pembahasan lintas sektor untuk menyepakati indikator dan target kinerja yang perlu diampu oleh masing-masing perangkat daerah, mendeteksi kebutuhan pemenuhan target kinerja, dan menjadikannya sebagai referensi dalam penyusunan RKA kegiatan, baik untuk tahun rencana (n) maupun untuk tahun berikutnya (n+1).

Di tahap ini peta target kinerja *outcome* sebagai target kinerja bersama lintas sektor dan target kinerja *output* dari tiap sektor diharapkan tersusun. Peta target kinerja ini selanjutnya berfungsi sebagai instrumen koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu skala kabupaten.

DPMD selanjutnya mengomunikasikan target kinerja *outcome* dan *output* ini kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa agar menjadi referensi bersama dalam penyalarsan dukungan masing-masing bagi pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu bagi siswa melaut yang termasuk warganya.

3.3 Internalisasi Kegiatan ke dalam RKA Masing-Masing

Tahap ini bertujuan memastikan kesepakatan indikator kinerja *outcome* dan *output* diinternalisasi oleh tiap perangkat daerah ke dalam RKA masing-masing, baik untuk tahun rencana (n) maupun tahun berikutnya (n+1).

Di tahap ini Bappeda mendukung tiap perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada tahun berjalan dan/atau mengalokasikan anggaran pada tahun rencana untuk membiayai target kinerja *output* yang telah disepakati bersama secara lintas sektor.

Kepastian dukungan kegiatan dari tiap perangkat daerah diharapkan tercapai di tahap ini. Sumber pembiayaan kegiatan dari tiap perangkat daerah ini dapat berasal dari APBD secara umum, DAU, BOS, atau DID.

3.4 Penyusunan/Update Regulasi sebagai Landasan Keberlanjutan Penyelenggaraan Layanan

Tahap ini bertujuan menyiapkan regulasi untuk mendukung legalitas dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan. Substansi regulasi disiapkan berdasarkan konsep pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu yang mempertimbangkan kondisi dan situasi kabupaten.

Kegiatan pokok pada tahap ini meliputi:

- 1) Perumusan konsep pelaksanaan, dan
- 2) Penyusunan regulasi berdasarkan konsep pelaksanaan.

Perumusan konsep pelaksanaan mencakup langkah-langkah berikut:

- a) Dinas Pendidikan membentuk Tim Perumus Layanan Pendidikan Kelas Perahu yang beranggotakan perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bappeda, DPMD, perwakilan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan perwakilan sekolah/guru.
- b) Tim Perumus mengadakan pertemuan untuk membahas:
 - 1) prinsip kerja Layanan Pendidikan Kelas Perahu, contoh prinsip yang dimaksud antara lain: terintegrasi antara proses pendidikan yang berlangsung di kelas dan luar kelas,
 - 2) sistem pembelajaran Layanan Pendidikan Kelas Perahu,
 - 3) peran pihak-pihak yang diharapkan terlibat,
 - 4) belanja yang dibutuhkan dan sumber pembiayaannya,
 - 5) instrumen pendataan/pemutakhiran data siswa sasaran Layanan Pendidikan Kelas Perahu,
 - 6) mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dan
 - 7) jenis regulasi/kebijakan yang perlu disediakan untuk landasan penyelenggaraan layanan.

Hasil pembahasan selanjutnya menjadi masukan dalam tahap penyusunan regulasi pelaksanaan layanan.

Regulasi pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu diharapkan berbentuk peraturan bupati atau bentuk lain yang mampu memantapkan peran lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Substansi pengaturan memanfaatkan hasil pembahasan Tim Perumus perihal konsep pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Pada kegiatan penyusunan regulasi ini, Bappeda dan Dinas Pendidikan mengadakan pembahasan dengan Sekretariat Daerah terkait proses penyusunan dan pengesahan regulasi pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Untuk regulasi teknis pelaksanaan, Dinas Pendidikan atau perangkat daerah lain yang terlibat dalam mendukung Layanan Pendidikan Kelas Perahu dapat mengeluarkan kebijakan instansi masing-masing seperti SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 241/3119/Disdik Tahun 2018 tentang Tim Kerja Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

3.5 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Tahap ini bertujuan menyediakan Tim Pendamping untuk Layanan Pendidikan Kelas Perahu dengan jumlah dan kompetensi anggota yang memadai.

Di tahap ini Dinas Pendidikan memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dalam hal:



- penunjukan guru pendamping Layanan Pendidikan Kelas Perahu, dan
- pengembangan kapasitas guru pendamping Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Peningkatan kapasitas guru pendamping bertujuan meningkatkan kompetensi sekolah dan guru dalam menyusun LKS dan bahan ajar. LKS dan bahan ajar merupakan media utama untuk membantu siswa belajar mandiri. Karena itu, guru pendamping dituntut untuk memiliki kompetensi menyusun LKS berdasarkan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan bagi sekolah dan guru pendamping yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait:

- a) konsep LKS sebagai materi belajar dalam Layanan Pendidikan Kelas Perahu,
- b) kekhususan LKS bagi Layanan Pendidikan Kelas Perahu,
- c) prinsip penyusunan dan sumber materi LKS, dan
- d) format dan struktur LKS.

Gambar 4. Contoh Hasil Penyusunan LKS

LEMBAR KEGIATAN SISWA

Nama Siswa : _____

Satuan Pendidikan : _____
 Kelas : IV (empat)
 Tema : 8. Daerah Tempat Tinggal
 Sub Tema : 1. Lingkungan Tempat Tinggal
 Pembelajaran : 4

Tujuan LKS ini adalah mencari tahu kegemaran anggota keluarga melalui kegiatan wawancara, mengetahui jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita.

A. Alat dan Bahan

- Teks Bacaan
- Buku tulis atau kertas
- Pulpen atau pensil

B. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Siswa ditugasi melakukan wawancara dengan anggota keluarga.
2. Siswa diminta melengkapi kolom yang tersedia berdasarkan hasil wawancara.
3. Siswa diminta mengamati kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.
4. Siswa membaca teks.
5. Selesai membaca, siswa diminta menjawab pertanyaan tentang tokoh.

TIPS

1. Orang tua diharapkan memberikan jawaban yang benar terhadap kegemaran setiap anggota keluarga
2. Orang tua diharapkan memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya
3. Orang tua dapat berkomunikasi dengan guru apabila mengalami kesulitan

C. Inspirasi



1. Buku Pedoman Guru Tema 8 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 8 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Gambar berbagai jenis kegiatan ekonomi
3. Cerita tentang Pulau Salemo ditemukan di Barry Kusuma Youtube Channel

Kegiatan 1. Melakukan kegiatan wawancara



1. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu.
2. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu.
3. Lengkapi kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan.

No	Nama Anggota Keluarga	Kegemaran/kesukaan
1.	Ayah	_____
2.	Ibu	_____
3.	Kakak	_____
4.	Adik	_____



Kegiatan 2. Mengamati kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen





Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen.





Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor.

Mengambil contoh kehidupan anak melaut sehari-hari



Kegiatan 3. Membaca teks dan menjawab pertanyaan



Pulau Salemo, Tempatnya Penghawal Al Quran Klik.

Pulau Salemo adalah satu dari sekian pulau kecil yang berjejer di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di bawah pemerintahan H. Syamsuddin A. Hamid sebagai Bupati dan H. Syahban Sammana sebagai Wakil Bupati. Pulau yang luasnya kurang lebih hanya 10 Km² ini sangat padat ditinggali oleh penduduk, dan mereka mayoritas muslim. Bahkan pulau ini kini sedang proses dicanangkan sebagai pulau santri Salemo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam sejarah lisan, menurut orang tetua yang hidup di pulau ini, sebelum Indonesia merdeka, pulau ini menjadi pelabuhan. Ratusan perahu dagang phinisi milik para saudagar kaya yang bermukim di situ. Armada phinisi ini melayani perdagangan antar pulau Sulawesi-Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Manila.

Pulau ini juga menjadi salah satu pusat pengajaran ilmu-ilmu Islam di Sulawesi Selatan. Banyak alim ulama yang memilih tinggal di sini dan menarik banyak murid dari berbagai penjuru, dari Mandar sampai Selayar, untuk belajar agama, pernah memiliki pesantren terbesar di Sulawesi Selatan, tempat pengajaran para ulama besar seperti KH. Jamalludin Assagaf Puang Ramma dan KH. Rahman Matameng.

Di sini terdapat langgar yang mengajarkan anak-anak kecil berumur 2 sampai 3 tahun untuk belajar membaca Al Quran selangit menghapalnya, sehingga banyak anak-anak yang memasuki kelas 6 SD sudah menghafal ayat-ayat Al Quran. Maka tidak salah jika pulau ini disebut sebagai Pulau penghawal Al Quran.

Sumber:
<http://instagram.com/barrykusuma> (Inspiring Photos through the Lens)
<https://www.youtube.com/barrykusuma> (Barry Kusuma Youtube Channel)

1. Bacalah teks tersebut!
2. Setelah membaca teks, jawablah pertanyaan berdasarkan teks

- a. Siapakah nama Bupati Pangkep pada cerita tersebut?
- b. Siapakah nama Wakil Bupati Pangkep pada cerita tersebut?
- c. Siapakah ulama besar yang pernah belajar di pulau Salemo?
- d. Mengapa banyak alim ulama memilih tinggal di pulau Salemo?
- e. Mengapa Pulau Salemo disebut sebagai pulau penghawal Al Quran?

Selamat Bekerja

Penilaian

Hasil	Kategori	Paraf Guru	Paraf Orang Tua

Disusun Oleh : Irmawati (Fasilitator Kelas Perahu)

LKS diisi dengan bacaan konteks pulau terkait tema yang dibahas agar anak bisa belajar mandiri

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah daftar guru pendamping Layanan Pendidikan Kelas Perahu dari tiap sekolah (yang memiliki siswa melaut). Daftar ini selanjutnya menjadi basis pengalokasian insentif guru pendamping Layanan Pendidikan Kelas Perahu dan basis rancangan pelatihan/peningkatan kapasitas yang perlu disediakan.

3.6 Sosialisasi Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Tahap sosialisasi bertujuan membangun pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan tentang tujuan, prinsip, dan bentuk Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu.

Sosialisasi dilakukan dalam dua tahapan berikut:

- a) Sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan DPMD untuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan sekolah yang akan melaksanakan Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Forum Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten dapat digunakan untuk sosialisasi sekaligus mendorong integrasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu sebagai program unggulan di bidang pendidikan untuk wilayah yang membutuhkan.
- b) Sosialisasi oleh Pemerintah Desa bersama pihak sekolah untuk masyarakat, orang tua siswa, dan pemberi kerja siswa melaut. Dalam kegiatan ini, sekolah membangun koordinasi reguler dengan Pemerintah Desa untuk bersama-sama mendorong Pemerintah Desa agar aktif memantau dan memberikan advokasi kepada keluarga siswa melaut agar anaknya dapat mengikuti Layanan Pendidikan Kelas Perahu dengan efektif, dan memotivasi orang tua/keluarga serta masyarakat agar mendukung pendidikan bagi warga/anak usia belajar di wilayahnya.

3.7 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Siklus Layanan Pendidikan Kelas Perahu selengkapnya ada di Gambar 1. Tahap ini bertujuan untuk menjalankan bagi siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu. Penjelasan lebih terperinci dan lengkap tentang tahap pelaksanaan ini tersedia pada Panduan Teknis Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu yang dapat diakses melalui tautan: <https://kompak.or.id/id/article/panduan-replikasi-layanan-pendidikan-kelas-perahu>

3.8 Pemantauan dan Evaluasi

Tahap ini bertujuan memantau dan mengevaluasi kemajuan penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu berdasarkan kesepakatan indikator *outcome* dan *output* yang disepakati secara lintas sektor.

Pemantauan dan evaluasi diharapkan setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- a) kemajuan pemutakhiran data siswa melaut,
- b) kemajuan pelaksanaan dan hasil/keluaran kegiatan pelatihan penyusunan LKS oleh Dinas Pendidikan,
- c) perkembangan proses pembelajaran dan hasil penilaian siswa Layanan Pendidikan Kelas

Perahu oleh guru pendamping dibantu oleh orang tua/pendamping belajar siswa, dan

- d) tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun sekolah.

Tabel 3. Indikator Capaian Layanan Pendidikan Kelas Perahu

CAPAIAN	INDIKATOR PENGUKURAN
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pemda dapat melakukan perencanaan dan penganggaran reguler untuk Layanan Pendidikan Kelas Perahu <input checked="" type="checkbox"/> Perluasan jangkauan layanan untuk kecamatan lain (replikasi) <input checked="" type="checkbox"/> Pembentukan sistem pendataan anak melaut, baik ATS maupun yang terus bersekolah
Capaian Utama	Penurunan angka ATS dan pencegahan kejadian putus sekolah pada anak yang rentan
Capaian Antara	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan kualitas sekolah/guru dalam penyusunan LKS dan bahan ajar <input checked="" type="checkbox"/> Tersedianya data siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu <input checked="" type="checkbox"/> Terselenggaranya Layanan Pendidikan Kelas Perahu yang berkualitas dan tepat sasaran sekaligus pelibatan lintas sektor <input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan dukungan Pemerintah Kecamatan dan Desa bagi siswa Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Bagian 4

Pelebagaan dan Replikasi Kelas Perahu

Guna memperkuat keberlanjutan penerapan Kelas Perahu, pemerintah daerah diharapkan memastikan pelebagaan Kelas Perahu melalui beberapa hal berikut ini:

- ☑ Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi. Penerapan di tahun-tahun awal diharapkan memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah perihal adaptasi yang perlu dilakukan terhadap model agar model lebih sesuai dengan konteks daerah dan lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapan.
- ☑ Memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, diharapkan menjadi cara efektif membangun pemahaman dan komitmen bersama atas tujuan penerapan model dan mendukung integrasi model ke dalam pelaksanaan peran/tugas dan fungsi masing-masing.
- ☑ Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya.
- ☑ Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model. Pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi/bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengakses pendampingan yang diperlukan.
- ☑ Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusat-pusat pengetahuan *regional* (*regional knowledge centers*) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model. Pembelajaran/praktik baik dari wilayah lain diharapkan menjadi *benchmark* bagi pemerintah daerah dalam menjaga ataupun meningkatkan capaian model.

Bagian 5

Lampiran

Panduan Teknis Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu: <https://kompak.or.id/id/article/panduan-replikasi-layanan-pendidikan-kelas-perahu>

Daftar Kontak untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



1. Dr. Sabrun Jamil, S.Pi., M.P.
Kepala Dinas Pendidikan
Telepon: 085395880709
2. Rukmini, S.Pd., M.Pd.
Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan
Telepon: 081355753312
3. Dr. Abdul Gaffar, S.T., M.Si.
Kepala Bappeda
Telepon: 082345766176

LEMBAR KEGIATAN SISWA

Nama Siswa : _____

Satuan Pendidikan : _____

Kelas : V

Semester : 2

Tema : 8. Lingkungan Sahabat Kita

Sub Tema : 1. Manusia dan Lingkungan

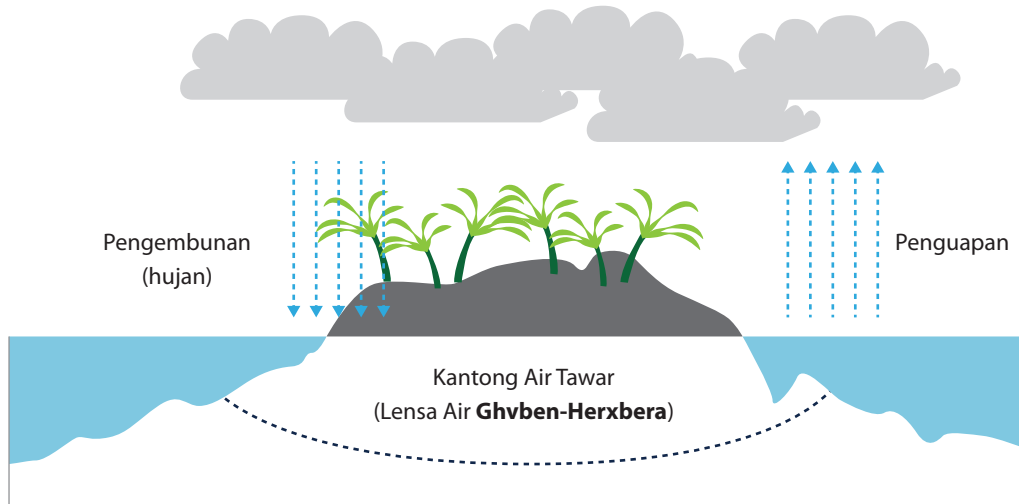
PEMBELAJARAN 1

MUATAN PELAJARAN	KOMPETENSI DASAR
BAHASA INDONESIA	3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8 Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi
IPA	3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup 4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber
IPS	3.2 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia

METODE DAN TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar.
2. Melalui kegiatan membaca, mengamati dan wawancara siswa mampu mengidentifikasi siklus air dan dampak ketersediaan air di kepulauan
3. Melalui membaca, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman.
4. Melalui kegiatan membaca, mengamati dan wawancara siswa mengelompokkan cara penangkapan dan ekstraksi hasil laut di kepulauan dan dampak negatif dan positif untuk masing-masing cara tersebut.
5. Melalui kegiatan nomor 4 setiap kelompok menyusun laporan berupa hasil analisis ke dalam tulisan secara runtut dari permasalahan hingga kesimpulan dan saran.

Perhatikan Gambar di bawah ini!



1. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut?

2. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa?

3. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan?

4. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan?

5. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu?



Kelangkaan air di Kepulauan Spermonde: di masa lalu, saat ini dan masa datang

Pulau-pulau di gugusan kepulauan Spermonde berukuran kecil tidak melebihi ukuran diameter 3 km dan terbentuk dari gugusan karang. Sumber mata air alami di pulau kecil hanya berasal dari dua sumber utama yaitu (i) hujan dan (ii) air tanah.

Dari gambar siklus air di atas, terlihat bahwa persediaan air tawar di kepulauan dipengaruhi berbagai faktor seperti laju penguapan dan pengembunan. Namun demikian terdapat faktor lain yang tidak terlihat di gambar. Sementara persediaan air tawar di kepulauan semakin menurun baik secara kualitas dan kuantitas akibat masuknya air laut ke daratan (intrusi), rusaknya terumbu karang yang berfungsi menjadi penghalang erosi air laut; kebutuhan (permintaan) air tawar semakin meningkat dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di pulau.



Sumber: Defriatno Neke/Kompas.com

Seorang warga Pulau Sakuala, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara sedang mengambil air

Perubahan iklim (pemanasan global) juga semakin mempercepat kelangkaan air di kepulauan kecil karena meningkatkan laju penguapan dibandingkan pada masa lalu. Semakin tingginya permukaan air laut (es di kutub mencair) menyebabkan kantong air tawar semakin mengecil akibat laju erosi pantai yang semakin cepat. Perubahan iklim juga semakin membuat angin topan semakin kuat yang dalam kondisi tertentu membuat ombak besar dan air laut masuk mencemari kantong air tawar di kepulauan.

Pengelolaan air di kepulauan Spermonde juga belum ada, namun di kepulauan Banda misalnya terdapat aturan setempat yang membatasi jumlah sumur dan pemanfaatan air tawar. Ketiadaan pengelolaan air juga semakin mengancam ketersediaan air di kepulauan Spermonde.

Beberapa pulau sudah mengalami kekurangan air seperti di Sakuala, Bone Tambung dan Barrang Caddi. Menurut masyarakat setempat permasalahan kesulitan air mulai sangat terasa semenjak tahun 1960 di mana hampir di seluruh sumur di ketiga pulau terasa asin.

Memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan semakin langkanya ketersediaan air tawar di kepulauan spermonde akibat kerusakan lingkungan, upaya untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan perlu diupayakan antara lain (i) menjaga kelestarian karang dengan menangkap hasil laut dengan menggunakan alat tangkap yang bersahabat dengan alam; (ii) melarang penggunaan bahan peledak dan racun –sianida-; (iii) mengelola penggunaan air tawar di pulau untuk kepentingan bersama; dan (iv) membangun fasilitas penyulingan air laut.

TUGAS 1

Setelah membaca bacaan "Kelangkaan air di kepulauan Spermonde? Wawancarilah tokoh yang dituakan di masyarakat untuk mengetahui ketersediaan air di masa lalu baik secara kuantitas dan kualitas menggunakan daftar pertanyaan berikut. Kamu bisa menambahkan pertanyaanmu sendiri. Orang yang diwawancarai (atau disebut juga responden) harus memenuhi persyaratan:

- Berusia sedikitnya 50 tahun
- Telah tinggal di pulau setidaknya 20 tahun
- Pilihlah paling sedikit dua responden, satu laki-laki dan satu perempuan.

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1	Bagaimana rasa air tawar di pulau (nama pulau) ini 50 tahun lalu?	a. Jernih, tawar dan tak berbau b. Jernih, tak berbau dan asin c. Jernih, tawar dan berbau d. Keruh, bau dan asin	
2	Mudahkah mendapatkan air tawar di pulau (nama pulau) ini 50 tahun lalu?	a. Sangat mudah b. Mudah c. Sangat sulit d. Tidak tahu	
3		

TUGAS 2

Lakukan pengamatan ketersediaan air di lingkunganmu baik secara kuantitas maupun secara kualitas! Gunakan tabel berikut, tambahkan hal lain yang ingin kamu amati.

No	Pengamatan	Hasil Pengamatan
1	Sumber air / mata air di pulau	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
2	Bagaimana ketersediaan air tawar di masing-masing sumber air tersebut pada nomor 1?	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
3	Bagaimana rasa air tawar pada masing-masing sumber air tersebut pada nomor 1?	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
4	_____	

TUGAS 3

Berdasarkan hasil wawancara (tugas 1) dan pengamatan (tugas 3) susunlah laporan kegiatan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, berisi tulisan mengapa terjadi kelangkaan air di kepulauan Spermonde.
- Bab 2 Rangkuman hasil wawancara dan pengamatan.
- Bab 3 Kesimpulan hasil wawancara dan pengamatan.
- Bab 4 Penutup, berisi saran menurut kalian untuk mengatasi kelangkaan air di kepulauan Spermonde

Selamat Bekerja

Penilaian

Hasil	Kategori	Paraf Guru

Referensi

- Kurikulum K13 Revisi tahun 2018 (Permendikbud 37 tahun 2018), Kemdikbud, 2018.
- Kathleen Schwerdtner Manez, Sainab Husain, Sebastian CA Ferse, Maria Manez Costa, Water Scarcity in the Spermonde Archipelago, Sulawesi, Indonesia: Past, Present and Future, ScienceDirect, 2012.
- Wikipedia Water Lens [https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_\(hydrology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(hydrology)).

